

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang hampir selalu dihadapi setiap negara di dunia. Biasanya kemiskinan menjadi topik utama permasalahan pada negara berkembang tak terkecuali Indonesia.(Zulvitri 2023).Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara Indonesia, kemiskinan biasanya sangat sulit untuk diatasi terutama pada negara-negara yang masih berkembang, Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dan masih mempunyai banyak masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi dan harus diatasi salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, Kesehatan dan gizi anak-anak(Museliza, dkk,2020)

Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang., kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan.(Rukmana et al, 2022)

Kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak seharusnya menjadi gambaran utama mengukur kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa ditafsirkan secara sederhana namun butuh pendekatan secara multidimensi untuk memahami fenomenanya. Untuk itu pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan multidimensi menjadi pilihan yang lebih bijak sehingga strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dicapai secara optimal. Selain persoalan diatas, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kaitannya dengan Pembangunan ekonomi juga harus menjadipokok perhatian (Hutagalung 2021). Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan sulitnya pencapaian kesejahteraan serta turunnya angka kemiskinan sebagai tujuan pembangunan ekonomi.(Hutagalung ,2021)

Demikian pula kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana dapat dilihat pada laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah, akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk wilayah tersebut. Selanjutnya produktivitas yang rendah akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat membawa seseorang jatuh dalam kemiskinan. Adapun kemiskinan multidimensi merupakan tinjauan dari berbagai kekurangan atau masalah yang dialami oleh warga miskin dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kesehatan yang buruk, standar hidup yang tidak memadai, pendidikan yang minim, ketidakberdayaan, kualitas pekerjaan yang buruk, ancaman kekerasan, dan

tinggal di lingkungan yang berbahaya. Pengukuran kemiskinan multidimensi dapat memuat berbagai indikator yang menangkap kompleksitas fenomena untuk selanjutnya menjadi dasar rumusan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan dan kelemahan di suatu wilayah. Indikator ini dapat dipilih sesuai konteks dan tujuan pengukuran, untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas wilayah tersebut. (Muhammad Rafi Farel,dkk, 2022)

Bantuan social merupakan program dari pemerintah yang memberikan bantuan kepada individu atau masyarakat yang memiliki pendapatan minimum, ataupun yang memiliki perekonomian yang rentan terhadap kesejahteraan atau kemiskinan. Program ini dapat berupa bantuan langsung tunai ataupun melalui barang.untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut pemeritah Indonesia melalui Kementerian Sosial memiliki beberapa program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan. Dua di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuann sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Datar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemeritah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia intermasional dengan istilah *Condiitonal Cash Transfers (CCT)*. Sejak diluncurkan pada tahun 2007 PKH telah berkontribusi dalam menekan angka

kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat. (Guru, Kependidikan, and Pendidikan, 2020). Dari awal peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) ini pada tahun 2007 hingga tahun saat ini. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya sebatas pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu atau miskin. Namun saat ini Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu masyarakat mampu meningkatkan ekonominya sendiri secara mandiri dengan diberi pendampingan, dengan hal tersebut keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bisa membuka usaha atau memutar uang yang diterimanya sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya. Dan nantinya akan ada graduasi Program Keluarga Harapan, yaitu pelepasan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang ekonomi sosialnya telah meningkat (Sasmita and Sufiawan, 2022).

Tabel 1.1
Kriteria penerima PKH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

No	Kriteria Penerima PKH
1.	Ibu hamil dengan maksimal kehamilan kedua
2.	Maksimal ada dua anak usia dini dalam keluarga tersebut
3.	Maksimal ada satu anak usia Sekolah Dasar dalam keluarga tersebut
4.	Maksimal ada satu anak usia Sekolah Menengah Pertama dalam keluarga tersebut
5.	Maksimal ada satu anak usia Sekolah Menengah Atas dalam keluarga tersebut
6.	Ada satu lansia maksimal dalam keluarga tersebut
7.	Ada satu penyandang disabilitas maksimal dalam keluarga tersebut

Sumber: Kementerian Sosial, 2024

Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menargetkan bantuan sosial kepada keluarga yang paling membutuhkan, dengan mempertimbangkan komposisi keluarga dan kebutuhan khusus dari anggota keluarga tersebut. Dengan menetapkan kriteria ini, PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga yang rentan. Dengan bantuan tersebut diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat menikmati dan merasakan bahwa Pendidikan dapat mengurangi angka putus sekolah yang akan berdampak pada kesejahteraan ,kriminalitas, pengangguran dan hal lainnya, akses kesehatan yang mampu mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi, ataupun akses kesehatan lainnya.

Jika salah satu dari kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut umumnya tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH. Kriteria yang telah ditetapkan bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kondisi tertentu yang sesuai dengan tujuan program. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa ada kebijakan atau pertimbangan khusus yang dapat diterapkan. Misalnya, jika ada alasan yang sah atau kondisi tertentu yang membuat keluarga tersebut layak menerima bantuan meskipun tidak memenuhi semua kriteria, mereka mungkin masih dapat dipertimbangkan untuk menerima bantuan.

Salah satu program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia selain Bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) .Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah

konversi dari beras sejahtera atau Rastra ,bantuan ini akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai syarat mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) para keluarga penerima harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung (Muharir 2022). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Dalam program BPNT, keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan bantuan pangan non-moneter bulanan oleh pemerintah dengan menggunakan kartu elektronik atau rekening elektronik. (Anggraini et al, 2024)

Tujuan penyaluran dukungan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mencapai indikasi6T (tepat sasaran, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi). BPNT diberikan kepada KPM yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan bantuan. Ketepatan dalam menilai besaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan KPM memastikan bahwa

bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan harga yang tepat akan memastikan bahwa nilai bantuan yang ditawarkan selaras dengan nilai pasar dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang sesuai bagi KPM. Memastikan penilaian ketersediaan dan alokasi bantuan BPNT tepat waktu berdasarkan jadwal yang ditentukan, menjamin KPM menerima bantuan dengan segera. Memastikan kualitas bantuan BPNT yang diterima KPM sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, termasuk jenis dan kualitas bahan pangan. (Anggraini et al, 2024)

Tabel 1.2
Kriteria Penerima BPNT

No	Kriteria Penerima BPNT
1.	Warga Negara Republik Indonesia
2.	Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3.	Pendapatan Rendah
4.	Tidak Berafiliasi dengan PNS, TNI, Polri, atau BUMN, BMUD
5.	Tidak Menerima Bantuan Sosial Lain
6.	Bukan Pendamping Sosial PKH

(sumber : kementerian sosial, 2024)

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar seringkali menghadapi berbagai tantangan, khususnya tantangan kemiskinan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan

untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur .

Teori human kapital berperan penting dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, yang merupakan program bantuan sosial bersyarat. Teori ini menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh dua faktor utama: Pendidikan dan Kesehatan. Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. (Muhammad, Taher, and Anjar, 2021). Teori human capital juga mendasari pengaruh bantuan pangan non tunai terhadap kemiskinan yang dilihat dari perspektif Pendidikan dan Kesehatan. Teori human capital berfokus pada investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas individu.

Indonesia sebagai negara berkembang, tentu masih saja mengalami masalah kemiskinan. Bahkan salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi dengan kategori provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan isu yang memerlukan perhatian dan Tindakan yang tulus. Banyak penduduk wilayah ini yang hidup dalam kondisi yang sulit menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor-faktor seperti

kurangnya akses terhadap Pendidikan, peluang kerja, dan infrastruktur yang memadai kontribusi pada masalah kemiskinan yang ada di Provinsi NTT.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 Provinsi NTT menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia dengan presentase sebesar 20,23 persen pada bulan September 2022. Dengan tingginya tingkat kemiskinan di NTT menjadikan NTT sebagai provinsi dengan presentase penderita Stunting nomor satu di Indonesia pada tahun 2022. Nusa Tenggara timur merupakan salah satu Provinsi di tenggara Indonesia dengan wilayah administrative 21 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di peringkat ke 3 sebagai Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bukan hanya pada jumlah atau persentasenya yang tinggi, tetapi juga pada disparitas antarwilayah yang sangat tinggi. Perbandingan antar kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang besar.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Wilayah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	28,29	28,17	28,39	27,47	27,17	26,52
Sumba Timur	30,02	29,65	29,68	28,22	28,08	27,04
Kupang	23,03	22,77	22,98	21,70	21,78	21,37
TTS	27,87	27,49	22,64	25,45	25,18	24,68
TTU	22,45	22,28	22,62	21,50	21,85	20,89
Belu	15,54	15,37	15,68	14,84	14,30	13,86
Alor	21,59	21,09	21,09	20,05	19,97	19,87
Lembata	26,30	26,14	26,21	25,18	24,78	24,22
Flores Timur	10,90	10,84	11,14	10,75	11,77	11,25
Sikka	13,53	13,12	13,36	12,61	12,56	11,89
Ende	23,18	23,76	24,13	23,00	22,86	22,57
Ngada	12,48	12,58	12,58	11,93	12,06	11,87
Manggarai	20,55	20,34	20,48	19,48	19,69	19,01

Rote Ndao	27,95	27,54	28,18	27,45	27,05	25,78
Manggarai Barat	18,01	17,71	17,92	17,15	16,92	16,74
Sumba Tengah	34,62	34,49	34,27	32,51	31,78	30,84
Sumba Barat Daya	28,06	28,00	28,18	27,16	27,48	27,20
Nagekeo	12,85	12,61	12,91	12,05	12,33	12,30
Manggarai Timur	26,49	29,52	26,50	25,35	25,08	24,90
Sabu Raijua	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37	28,13
Malaka	16,12	16,04	16,33	15,26	14,42	13,92
Kota Kupang	9,22	8,96	9,17	8,61	8,61	8,24
NTT	21,35	20,99	20,99	20,05	19,96	19,48

(Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))

Secara keseluruhan, kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian dan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Begitu pula kemiskinan yang terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten manggarai Timur merupakan kabupaten termiskin pertama dari total 8 kabupaten yang ada di daratan Flores. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 mencapai angka 74,40 ribu jiwa. Sementara secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur menempati urutan ketiga jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

.Dalam konteks kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur,kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah demi terciptanya kesejahteraan yang merata..

Tabel 1.4
Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur,Manggarai Tengah dan
Manggarai Barat Tahun 2019-2024

Wilayah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Manggarai Timur	26,49	26,52	26,50	25,35	25,06	24,90
Manggarai Tengah	20,55	20,34	20,48	19,48	19,69	29,01
Manggarai Barat	18,01	17,71	17,92	17,15	16,82	16,74

(Sumber :BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas))

Adapun mengapa Manggarai Timur menjadi kabupaten termiskin di bandingkan 2 kabupaten lainnya,Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam salah satu daerah tertinggal tahun 2020-2024. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.Manggarai Timur memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Wilayah yang cukup terpencil dan terisolasi membuat distribusi barang dan jasa menjadi lebih sulit. Kurangnya jaringan jalan yang memadai, akses ke pasar, dan fasilitas transportasi yang efisien menghambat mobilitas penduduk serta distribusi barang yang dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal. hal ini sering kali disebut sebagai hambatan mobilitas yang menghalangi pembangunan ekonomi.

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Manggarai Timur menjadi salah satu faktor kemiskinan, hal ini berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tidak cukup berkembang untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang semakin

kompetitif. Kurangnya akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan membuat sebagian besar penduduk tetap bergantung pada pekerjaan di sektor informal yang rendah produktivitasnya.

Sebagai Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Sosial telah melaksanakan Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui program pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai Timur selama ini sejak memisahkan diri dari Kabupaten Manggarai adalah menyangkut dengan urusan yang fundamental seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan tidak diatasi dengan baik.

Bantuan sosial merupakan salah satu strategi pemerintah yang memiliki tujuan untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan di kabupaten Manggarai Timur tepatnya di Desa Satar Punda Barat dalam kaitannya mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT dan Bansos yang dikemas dalam bentuk jaminan sosial yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan. Kebijakan Pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat berupa pemberian bantuan sosial tersebut diberikan kepada Masyarakat miskin dan yang kurang mampu dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

PKH dan BPNT dapat secara signifikan memperkecil Tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Pedesaan meskipun bantuan telah diberikan, masih banyak terdapat keluarga di desa yang masih berada dalam kondisi miskin atau hanya mengalami sedikit peningkatan dalam kesejahteraan mereka. Situasi ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara target program dan pencapaian yang terlihat secara langsung. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah disusun dengan tujuan menjangkau seluruh keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu di Pedesaan. Situasi sebenarnya cukup kompleks dimana banyak keluarga yang seharusnya memenuhi syarat tidak terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan, sementara sebaliknya ada yang tidak memenuhi syarat namun dapat menerima bantuan. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dan ketidakadilan di tengah masyarakat desa.

PKH dan BPNT diharapkan tidak hanya mengatasi kemiskinan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan dan layanan dasar lainnya. Masyarakat diharapkan memiliki pandangan positif terhadap PKH dan BPNT sebagai Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat desa. Terdapat keraguan masyarakat mengenai efektivitas program, dengan beberapa orang merasa bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menciptakan gap antara harapan masyarakat terhadap program dan pengalaman yang sebenarnya. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Di banyak desa keterbatasan infrastruktur, seperti

akses ke layanan Kesehatan dan Pendidikan menghambat efektivitas PKH dan BPNT. Masyarakat mungkin tidak dapat memanfaatkan bantuan secara optimal karena kurangnya fasilitas yang mendukung.

Penelitian ini difokuskan pada Desa Satar Punda Barat, memberikan sudut pandang baru dalam konteks kehidupan pedesaan. Penelitian di daerah pedesaan sering kali kurang dibandingkan dengan penelitian di daerah perkotaan, sehingga penting untuk mengeksplorasi dinamika yang unik di desa. Penelitian ini menginvestigasi bagaimana partisipasi aktif masyarakat mempengaruhi efisiensi program PKH dan BPNT. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program, namun sering kali diabaikan dalam penelitian sebelumnya.

Kemiskinan di pedesaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Banyak keluarga di desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian lokal. Oleh karena itu melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa. Salah satunya adalah kemiskinan yang terjadi di Desa Satar Punda Barat. Desa Satar Punda Barat merupakan Desa yang terletak di bagian Utara Kabupaten Manggarai Timur dan merupakan salah satu desa yang mata pencaharian penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Di Desa Satar Punda

Barat terdapat sekitar 2023 jumlah penduduk, terdiri dari 504 Kepala Keluarga, 1000 laki-laki dan 1023 perempuan.

Tabel 1.5
Jumlah Penerima PKH dan BPNT di Desa Satar Punda Barat

Tahun	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Penerima BPNT
2019	80	74
2020	80	74
2021	85	77
2022	85	77
2023	134	81
2024	134	81

(Sumber : Kantor Desa Satar Punda Barat)

Dari tabel, terlihat bahwa jumlah penerima PKH di Desa Satar Punda Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah penerima tetap sebanyak 80 orang. Namun, mulai tahun 2021, jumlah penerima meningkat menjadi 85 orang, dan terus meningkat hingga mencapai 134 orang pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel menunjukkan bahwa jumlah penerima BPNT di Desa Satar Punda Barat mengalami fluktuasi yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah penerima adalah 74 orang. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022, jumlah penerima meningkat menjadi 77 orang. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penerima kembali meningkat menjadi 81 orang.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penerima PKH lebih banyak dibandingkan dengan penerima BPNT, terutama pada tahun 2023 dan 2024, di mana penerima PKH mencapai 134, sedangkan penerima BPNT hanya 81. Alasannya karena PKH biasanya memiliki kriteria yang lebih luas dan mencakup lebih banyak aspek, seperti kondisi ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan. Hal ini memungkinkan lebih banyak keluarga untuk memenuhi syarat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan peneliti yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Satar Punda Barat,Kabupaten Manggarai Timur?
2. Apakah Bantuan Sosial PKH dan BPNT berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Satar Punda Barat,Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial program bantuan PKH dan program bantuan BPNT terhadap kesejahteraan di Desa Satar Punda Barat,Kabupaten Manggarai Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan rogram bantuan PKH dan program bantuan BPNT terhadap kesejahteraan di Desa Satar Punda Barat,Kabupaten Manggarai Timur

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di komunitas mereka. Informasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut dan perannya dalam mendukung kesejahteraan.

2. Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan implementasi program agar lebih tepat sasaran.

3. Institusi

Hasil penelitian dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan kemampuan staf institusi dalam memahami dan menangani isu-isu terkait kemiskinan.

4. Peneliti dan Mahasiswa

a. Peneliti

Peneliti dapat mengasah kemampuan analisis data, memahami fenomena sosial, serta mengevaluasi kebijakan publik melalui penelitian

ini.. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti tentang bantuan social PKH dan BPNT terhadap kemiskinan.

b. Mahasiswa

Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kopleksitas masalah kemiskinan dan upaya penanggulangannya melalui bantuan social